

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia), dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Karena letak geografisnya yang strategis dan besarnya luas perairan, Indonesia berbatasan langsung di laut dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Australia.

Indonesia merupakan Negara dengan kepulauan terbesar di dunia di bandingkan dengan Negara lain yang memiliki jumlah pulau sebesar 1.905.000 km. dan memiliki pulau sebanyak 17.503, dengan jumlah pulau yang banyak tersebut Indonesia memiliki salah satu potensi yang sangat kompetitif di bidang industri pariwisata, karena masing-masing daerah di Indonesia memiliki keunikan dan keanekaragaman budaya serta sejara dan warisan-warisan sejarah yang menarik untuk di ketahui dan di pelajari, oleh karena itu untuk melaksanakan pengelolaan dalam rangka pemanfaatan sumber daya secara optimal.

Pariwisata adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan untuk tujuan hiburan dan pariwisata. Menurut Prayogo (2018) Pariwisata secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perjalanan seseorang atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat lain membuat rencana dalam jangka waktu tertentu, untuk tujuan rekreasi dan mendapatkan hiburan sehingga keinginannya

terpenuhi. Berbagai pengertian pariwisata sangat banyak dijelaskan oleh para ahli-ahli pariwisata, seperti organisasi pariwisata dunia (*World Tourism Organization*). Pengertian wisata mengandung empat unsur, yaitu kegiatan perjalanan; dilakukan secara sukarela; bersifat sementara; perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Wisata berdasarkan jenis-jenisnya dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu sebagai berikut

a. Wisata Alam, yang terdiri atas:

1. Wisata pantai (*Marine tourism*), merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum
2. Wisata Etnik (*Etnik tourism*), merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik
3. Wisata Cagar Alam (*Ecotourism*), merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, Kesegaran hawa di pegunungan, keajaiban hidup binatang (margasatwa) yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain
4. Wisata Buru, merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakan oleh berbagai agen atau biro perjalanan,
5. Wisata Agro, merupakan jenis wisata yang mengorganisasikan perjalanan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan ladang pembibitan di mana wisata

rombongan dapat mengadakan kunjungan peninjauan untuk tujuan studi maupun menikmati segarnya tanaman di sekitarnya.

b. Wisata Sosial-Budaya, yang terdiri atas

1. Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monumen, wisata ini termasuk golongan budaya, monumen nasional, gedung bersejarah, kota, desa, bangunan-bangunan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lainnya seperti bekas pertempuran (battle fields) yang merupakan daya tarik wisata utama di banyak negara
2. Museum dan fasilitas budaya lainnya, merupakan wisata yang berhubungan dengan aspek alam dan kebudayaan di suatu kawasan atau daerah tertentu. Museum dapat dikembangkan berdasarkan pada temanya, antara lain museum arkeologi, sejarah entologi, sejarah alam, seni dan kerajinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, ataupun dengan tema khusus lainnya.

Sektor pariwisata yang sudah mendunia dan menyedot banyak wisatawan mancanegara bahkan lintas negara, juga pada akhirnya mampu menjadi duta bangsa yang mengabarkan pada dunia, eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Menjadi duta kepada dunia dan mengabarkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, aman, kondusif, maju dan sejahtera. Sektor pariwisata ini dapat memberi gambaran wajah Indonesia kepada dunia internasional.

Salah satu kebudayaan Indonesia yang masih menarik adalah tempat bersejarah yang ada di Kota Surabaya khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Simokerto kelurahan Kapanan Kota Surabaya yaitu Wisata Kampung

Pecinan. Lebih tepatnya berada di dalam sebuah perkampungan yang tidak banyak orang tahu dimana penduduknya di dominasi masyarakat thionghoa Surabaya. Dan kampung yang saat ini menjadi tempat wisata yang bisa di katakan sebagai tempat wisata tersembunyi di Kota Surabaya dulunya adalah perkampung yang sempat terkena bencana kebakaran sehingga mengabiskan seluruh pemukiman di sekitar wisata kampung pecinan.

Surabaya merupakan salah satu kota tua di Indonesia, ibukota provinsi Jawa Timur. Kota ini memiliki banyak tempat-tempat wisata termasuk wisata bersejarah yaitu kampung pecinan. Kampung pecinan di Kota Surabaya terdiri dari etnis Tionghoa yang lahir di Indonesia, dan kawasan Kapasan termasuk dalam kampung pecinan tersebut. Kapasan merupakan salah satu wilayah di Kota Surabaya yang mayoritas penduduknya dari etnis Tionghoa dan Madura. Wisata Kampung Pecinan di kelurahan kapasan ada sejak tahun 2019 tepatnya pada saat wabah COVID-19. Dan pada pertengahan tahun 2019 di bangun tempat wisata tersebut untuk di jadikan sebagai tempat hiburan masyarakat serta tempat untuk mencari nafkah.

Wisata kampung pecinan yang berada di kapasan adalah salah satu wisata pecinan yang tidak banyak di ketahui oleh masyarakat khususnya di Kota Surabaya. Meskipun wisata kampung pecinan yang ada di kapasan ini tidak banyak yang tahu akan tetapi sebetulnya wisata kampung pecinan di kapasan mengalami pengembangan yang patut di dukung oleh para masyarakat maupun pihak pemerintah pusat atau pemerintah daerah/kota.

“Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkunjung ke Kampung Pecinan, Jalan Kapasan Dalam, Simokerto, Minggu (16/1).

Kedatangan Erick disambut meriah oleh warga setempat. Menunjukkan identitas diri, warga kompak mengenakan pakaian adat Tionghoa. Sambil mencicipi es bubur kacang hijau, Erick menyaksikan beragam pertunjukan yang digelar. Misalnya, atraksi barongsai dan nyayian dengan diiringi musik tradisional. Erick menyatakan salut atas inovasi yang diciptakan warga setempat. Tradisi serta kesenian dan kebudayaan Tionghoa masih sangat terasa kental. Menurut dia, Wisata Kampung Pecinan (WKP) harus dikembangkan. Tidak sebatas wisata lokal. Namun, minimal menjadikan WKP sebagai destinasi di tingkat nasional. Erick mengatakan, pada awal pandemi Covid-19, kunjungan pariwisata merosot tajam. Yakni, turun 75–80 persen. Guna kembali meningkatkan profit, pihaknya mengembangkan industri pariwisata di lingkungan BUMN. Untuk meningkatkan perekonomian warga, pihaknya berfokus pada pengembangan penjualan produk UMKM melalui digitalisasi. Untuk mewujudkannya, beragam strategi dilakukan. Telkom ditugaskan untuk membangun infrastruktur. Yakni, membangun data center dan cloud wifi. Telkomsel lebih difokuskan untuk membangun kesempatan usaha bagi masyarakat. Terutama mendukung penjualan melalui online. Di akses pada 15 Januari [Kunjungi Kampung Pecinan, Menteri BUMN Tebar Semangat Berusaha \(jawapos.com\)](http://jawapos.com)

Wisata kampung pecinan ini juga sebagai pergerakan ekonomi daerah ataupun ekonomi pusat, karena wisata juga menjadi point penting dalam pembangunan bangsa Indonesia, karena seperti yang kita tahu saat ini pendapatan dari wisata di Indonesia juga sangat tinggi, di karenakan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia untuk berwisata, oleh karena itu perlu juga di kembangkan wisata-wisata lokal dari setiap daerah asal untuk di kenalkan kepada masyarakat dan menjadikan kemajuan ekonomi di bidang pariwisata.

Pariwisata di era otonomi daerah adalah wujud dari cita-cita Bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dalam arti bahwa pariwisata jika dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi secara langsung pada masyarakat di sekitar daerah pariwisata, terutama dari sektor perekonomian. Secara tidak langsung, pariwisata memberikan kontribusi signifikan kepada

pendapatan asli daerah (PAD) suatu daerah dan tentu saja pemasukan devisa bagi suatu negara. Akibat langsung yang timbul dari pemberian otonomi daerah adalah adanya “daerah basah” dan “daerah kering”. Hal ini disebabkan potensi dan kondisi masing-masing daerah di Indonesia tidak sama. Daerah yang kaya akan sumber daya alam otomatis menjadi “daerah basah” seiring dengan bertambahnya perolehan pendapatan asli daerahnya dari sektor migas misalnya, sedangkan daerah yang minus sumber daya alam otomatis menjadi daerah kering. (Suwena & Widyatmaja, 2010)

Dalam lingkup nasional, sektor pariwisata dianggap sebagai sektor yang potensial di masa yang akan datang. Menurut analisis *World Travel and Tourism Council* (WTTC) (2016) dan *World Bank* (2016), industri pariwisata di Indonesia telah menyumbang 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada saat ini dan diperkirakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di atas rata-rata industri. Peringkat ke-4 penyumbang devisa nasional, sebesar 9,3%. Pertumbuhan penerimaan devisa tertinggi, yaitu 13%. Biaya marketing hanya 2% dari proyeksi devisa. Penyumbang 9,8 juta lapangan pekerjaan, atau 8,4%. Lapangan kerja tumbuh 30% dalam 5 tahun. Pencipta lapangan kerja termurah US\$ 5.000/satu pekerjaan. (Suwena & Widyatmaja, 2010)

Berdasarkan analisis tersebut wajar jika industri pariwisata di Indonesia dinilai sebagai sektor andalan penyumbang devisa negara terbesar dalam bidang nonmigas. Terlebih ketika pemerintah Indonesia mencanangkan program otonomi daerah, maka industri pariwisata merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan daerah. Yang perlu mendapat perhatian

bahwa pengembangan industri pariwisata daerah terkait dengan berbagai faktor yang mau tidak mau berpengaruh dalam perkembangannya. Oleh karena itu perlu diketahui dan dipahami apa saja faktor-faktor yang secara faktual memegang peranan penting dalam pengembangan industri pariwisata daerah khususnya dalam rangka penerapan otonomi daerah, sehingga pada akhirnya pengembangan industri pariwisata daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah dan mendorong program pembangunan daerah. (Suwena & Widyatmaja, 2010)

Ada beberapa isu strategis (politik, ekonomi, sosial dan budaya) yang terkait dengan pariwisata di era otonomi daerah yaitu: pertama dalam masa penerapan otonomi daerah di sektor pariwisata adalah timbulnya persaingan antar daerah, persaingan pariwisata yang bukan mengarah pada peningkatan komplementaritas dan pengkayaan alternatif berwisata. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: 1) lemahnya pemahaman tentang pariwisata 2) lemahnya kebijakan pariwisata daerah 3) tidak adanya pedoman dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Akibatnya pengembangan pariwisata daerah sejak masa otonomi lebih dilihat secara parsial. Artinya banyak daerah mengembangkan pariwisatanya tanpa melihat, menghubungkan dan bahkan menggabungkan dengan pengembangan daerah tetangganya maupun provinsi/kabupaten / kota terdekat. Bahkan cenderung meningkatkan persaingan antar wilayah, yang pada akhirnya akan berdampak buruk terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Padahal pengembangan pariwisata seharusnya lintas provinsi atau lintas kabupaten/kota,

bahkan tidak lagi mengenal batas karena kemajuan teknologi informasi. Isu kedua terkait dengan kondisi pengembangan pariwisata Indonesia yang masih bertumpu pada daerah tujuan wisata utama tertentu saja, walaupun daerah-daerah lain diyakini memiliki keragaman potensi kepariwisataan. (Suwena & Widyatmaja, 2010)

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang mana menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat mengatur dan mengembangkan daerahnya secara mandiri dengan asas otonomi dan tugas pembantuan yang di arahkan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat serta peningkatan daya saing di setiap daerahnya dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. Salah satu usaha pemerintah dalam membangun sector pariwisata yang telah mendorong pembangunan pariwisata di berbagai daerah di Indonesia. Menurut peraturan pemerintah kota Surabaya Nomor 23 tahun 2012, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh pemerintah, pengusaha, dan masyarakat yang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
- b.meningkatkan kesejahteraan rakyat,
- c.menghapus kemiskinan
- d.mengatasi pengangguran,
- e. melestarikan alam, lingkungan dan budaya,
- f. memajukan kebudayaan .

Dalam ruang lingkup daerah, kontribusi industri pariwisata di bidang perpajakan diharapkan semakin meningkat dengan jalan melakukan pengembangan dan pendayagunaan potensi-potensi pariwisata daerah. Hanya saja pungutan pajak tersebut harus dilakukan secara bijaksana, artinya pungutan pajak harus tetap berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum dan kesederhanaan.

Pada dasarnya pengembangan industri pariwisata suatu daerah berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian daerah tersebut. Dampak positif yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat daerah setempat adalah adanya perluasan lapangan kerja secara regional. Ini merupakan akibat dari industri pariwisata yang berkembang dengan baik. Misalnya dengan dibangunnya sarana prasarana di daerah tersebut maka tenaga kerja akan banyak tersedot dalam proyek-proyek seperti pembangkit tenaga listrik, jembatan, perhotelan dan lain sebagainya.

Untuk mengembangkan industri pariwisata suatu daerah diperlukan strategi-strategi tertentu maupun kebijakan-kebijakan baru di bidang kepariwisataan. Sebuah gagasan menarik dari Sri Sultan HB X yang menyodorkan konsep kebijakan pariwisata borderless, yaitu suatu konsep pengembangan pariwisata yang tidak hanya terpaku pada satu obyek untuk satu wilayah, sedangkan pola distribusinya harus makin dikembangkan dengan tidak melihat batas geografis wilayah. Gagasan tersebut memberi angin segar bagi dunia kepariwisataan di Indonesia terlebih dengan diterapkannya sistem otonomi daerah. Paling tidak kebijakan baru tersebut menjadi salah satu alternatif yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi-potensi

wisata daerah melalui program kerjasama antar daerah. Namun demikian yang perlu mendapat perhatian di sini bahwa penerapan program kerjasama tersebut jangan sampai menimbulkan konflik yang justru berdampak merugikan, sehingga tujuan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi tidak tercapai. (Suwena & Widyatmaja, 2010)

Dalam pengembangan pariwisata di kota Surabaya merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat kota Surabaya. Pembangunan di kota Surabaya merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat kota Surabaya. Pembangunan desa memiliki peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Pembangunan desa ditunjukkan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa yang maju dan mandiri. Keberhasilan pembangunan didesa, semata-mata bukan hanya ditentukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang ada di tingkat pusat tetapi juga kebijakan yang dimplementasikan pada tingkat Provinsi, pemerintah kota dan Kecamatan.

Hal tersebut sesuai dengan poin ketiga Program Nawacita Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.” Pada poin ketiga tersebut memiliki maksud bahwa adanya pembangunan dari pinggiran memiliki semangat ekonomi yang tinggi sebab, dengan adanya pembangunan di daerah-daerah, maka pola distribusi pasti akan berubah. Pola distribusi yang semula menitikberatkan distribusi dari pusat ke daerah menjadi distribusi dari daerah ke pusat, sehingga pertumbuhan ekonomi didaerah dapat memberikan

kesejahteraan bagi masyarakat di daerah dan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan sila kelima dalam Pancasila.

Kampung pecinan yang berlokasi di kecamatan Simokerto adalah salah satu kampung pecinan yang memiliki konsep wisata pecinan yang berbeda dari yang lain yaitu salah satunya kampung pecinan yang memiliki nilai kesenian kungfu asli dari Tiongkok yaitu kungfu Hokkian, Kelenteng Tertua di Surabaya, dan memiliki China Town, tetapi posisi atau lokasi yang kurang strategis dari kampung pecinan yang ada di Simokerto berada pada perkampungan yang padat dengan para penjual dan pertokoan yang ada di sekitar kampung pecinan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berencana untuk melakukan penelitian mengenai wisata kampung pecinan yang berada di Kota Surabaya khususnya di wilayah Kapasan. Penelitian ini nantinya akan membahas mengenai bagaimana *collaborative governance* bisa berjalan dan berkembang dalam membangun wisata lokal yang bisa dikatakan baru saja dibangun dan dibuka pada tahun 2019. Yang bertujuan untuk memperkenalkan wisata lokal yang dimana masyarakat belum mengetahuinya, selain itu belum terdapat penelitian mengenai topik tersebut.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik memilih judul untuk penelitian "***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN WISATA KAMPUNG PECINAN KECAMATAN SIMOKERTO KOTA SURABAYA**"

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan data-data yang telah dijabarkan di atas, maka di tarik rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam skripsi yang akan di tulis yaitu bagaimana *collaborative governance* Dalam Pengembangan Pariwisata Kampung Pecinan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak di capai penulis adalah untuk mengetahui bagaimana *collaborative governance* Dalam Pengembangan Pariwisata Kampung Pecinan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis diatas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Bagi Peneliti

- a. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur,
- b. Dapat memperdalam ilmu pengetahuan tentang pariwisata berkelanjutan melalui pengembang yang di lakukan oleh setiap struktural yang terlibat dalam pengembangan wisata kampung pecinan yang ada di kecamatan simokerto kota Surabaya

## 2. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan referensi atau bahan literatur kepustakaan yang dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian yang sejenis.

## 3. Bagi kampung pecinan

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bantuan pemikiran dalam mengembangkan dan manfaat serta masukan bagi objek wisata kampung pecinan kecamatan Simokerto kota Surabaya.